

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

OLEH:

**PRATIWI BAEDA
E11.16.078**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MANGONDOW SELATAN**

OLEH:

**PRATIWI BAEDA
E11.16.078**

SKRIPSI

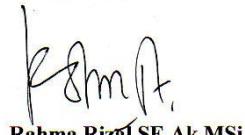
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2019

Pembimbing I



Dr. Gaffar La Tieke, M.Si
NIP ; 196212311987031029

Pembimbing II



Rahma Rizal SE.Ak.MSi
NIDN:0914027902

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Oleh
PRATIWI BAEDA
E11.16.078

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2020

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, SE , MM
2. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak
3. Shella Budiawan, SE., M.Ak
4. Dr. Abdul Gaffar Latjokke., M.Si
5. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si

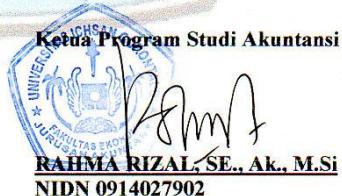
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. RAHMAYN S.Psi., SE., MM
NIDN 131211198201010001

Ketua Program Studi Akuntansi



RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 10 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Pratiwi Baeda
E11-16-078**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan yang terdiri dari rasio Derajar Desentralisas, tingkat ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian.

Hasilpenelitian menunjukkan bahwa rasio Derajat desentralisasi dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2015-2018 masuk dalam criteria sangat kurang dimana pada tahun 2015 sebesar 3,11%, pada tahun 2016 sebesar 2,90%, pada tahun 2017 sebesar 3,96% dan pada tahun 2018 sebesar 3,02%. Untuuk rasio ketergantungan keuangan daerah masuk dalam criteria Tinggi dimana pada tahun 2015 sebesar 96,89%, pada tahun 2016 sebesar 96,31% , pada tahuun 2017 sebesar 96,04% dan pada tahun 2018 sebesar 94,84%. Sedangkan untuk rasio Kemandirian dimana rasio ini tergolong rendah sekali dimana pada tahun 2015 sebesar 3,25%, pada tahun 2016 sebesar 3,04%, pada tahun 2017 sebesar 4,20% dan pada tahun 2018 sebesar 3,24%.

Kata Kunci : *Desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian*

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“MOTTO”

“Allah akanmeninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujaadilah: 11)

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu,”

(AlBaqarah : 45)

“Maka sesungguhnyabesertakesultananituadakemudahan”

(AlInsyirah : 5)

(PRA TIWI BAEDA)

“PERSEMPAHAN”

Atas Ridho-Nyaku persempahan karyaini sebagai rasa terimah kasihku kepada :

Kedua Orang TuaBapak Abdul Rahman Baeda dan IbuYusnita Yakin, yang telah melahirkan, membesar, membimbingku, dan tiada henti memberikan do'a, motivasi serta cinta dankasih sayang. Untuk ibu kedua saya Ervina Talapa terima kasih juga telah membesar, membimbingku, dan memberikan do'anya, untuk Alm.Hj Maryam Nupulo, Terima kasih telah membesar, mendidik dan selalu mendoakan keberhasilan dan menginginkanku menjadi yang terbaik.

Untuk suami saya Andra Kapugu, S.Pd, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta kasih sayang. Untuk keluarga tercinta, untuk dosen-dosen jurusan Akuntasi dan sahabat terdekat ku yang selalu menemani suka maupun duka.

Semoga limpahan rahmat dan cinta kasih Allah SWT selalu disertakan Aamin Yaa Robbal Alaamiin.,

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPATKU MENIMBA ILMU

2020

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkankehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga dapat menyelesaikanusulanpenelitianiniYang berjudul“ **Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**“. Dalam penyusunan Skripsi, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan danrahmat Allah serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari berbagai pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan.Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, serta tak lupa mengucapkan terimah kasih kepada :

Bapak Dr. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo,Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si,Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus selakun pembimbing I, Bapak Dr. Ariawan, SE.,S.Psi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, IbuRahma Rizal SE.Ak.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus bagi pembimbing II, Keduaorang tuayang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan, serta dosen dan staf administrasi Universitas Ichsan Gorontalo

dan Rekan- rekan seperjuangan Mahasiswa akuntansi angkatan 2016 yang tak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semua kebersamaan dan keceriaan yang tak terlupakan seumur hidupku.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati , Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Amiin

Gorontalo, 10 Februari 2020

Penulis

Pratiwi Baeda

E11.16.078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Akuntansi Pemerintah	9
2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah.....	9
2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah	10
2.1.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintah	12
2.1.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintah	13

2.1.6	Teori Anggaran	14
2.1.7	Pengertian Anggaran Daerah	16
2.1.8	Anggaran Sektor Publik	18
2.1.9	Anggaran APBD	21
2.1.10	Fungsi APBD.....	23
2.1.11	Prinsip-Prinsip Anggaran.....	23
2.1.12	Struktur APBD.....	25
2.1.13	Analisis perkembangan kinerja keuangan	30
2.2	Kerangka Pemikiran	34

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	36
3.2	Metode penelitian	36
3.2.1	Desain Penelitian	36
3.2.2	Sumber Dan Cara Pengumpulan Data	36
3.2.3	Definisi Operasional Variabel.....	37
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.5	3.2.5 Metode Analisis	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.2	Hasil peneltian	49
4.2.1	Derajat Desentralisasi.....	49
4.2.2	Rasio Ketrgantungan Keuangan Daerah	52
4.2.3	Rasio Kemandirian Daerah	54
4.3	Pembahasan	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpilan	67
5.2	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	26
Tabel 3.1 : Operasional variabel penelitian	38
Tabel 4.1 : Skala Interval Rasio Derajat desentralisasi	49
Tabel 4.2 : Komponen Rasio Derajat Desentralisasi	50
Tabel 4.3 : Skala Interval Rasio ketergantungan keuangan Daerah	52
Tabel 4.4 : Komponen Rasio tingkat ketergantungan keuangan Daerah.....	52
Tabel 4.5 : Skala Interval Rasio Keandirian.....	55
Tabel 4.6 : Komponen Rasio kemandirian keuangan daerah	55
Tabel 4.7 :Rasio Derajat Desentralisasi	59
Tabel 4.8 : Skalah Interval Rasio Ketergantungan Keuangan daerah	62
Tabel 4.9 : Skalah Interval Rasio kemandirian.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.2 : Kerangka pemikiran35

DAFTAR GRAFIK

Grafik-4.1 : Rasio Perkembangan Derajat Desentralisasi	51
Grafik-4.2 : Rasio Perkembangan Ketergantungan Keuangan.....	54
Grafik-4.3 : Rasio Perkembangan Kemandirian	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi APBD 2015.....	74
Lampiran 2 : Laporan Operasional APBD 2015.....	76
Lampiran 3 : Laporan Realisasi APBD 2016.....	78
Lampiran 4 : Laporan Operasional APBD 2016.....	80
Lampiran 5 : Laporan Realisasi APBD 2017.....	82
Lampiran 6 : Laporan Operasional APBD 2017.....	84
Lampiran 7 : Laporan Realisasi APBD 2018.....	86
Lampiran 8 : Laporan Operasional APBD 2018.....	88
Lampiran 9 : Dokumentasi.....	90
Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	93
Lampiran 11 : Hasil Turnitin.....	94
Lampiran 12 : Surat Keterangan Penelitian	98
Lampiran 13 : Surat Balasan Penelitian	99
Lampiran 14 : Curriculum Vitae	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah “suatu bentuk rencana kegiatan pemerintah daerah yang menunjukkan adanya sumber penerimaan dan pengeluaran yang dituangkan dalam bentuk angka-angka dan merupakan target minimal dan baiya yang merupakan batas maksimal dalam satu periode anggaran APBD yang disesuaikan dengan program-program pemerintah daerah yang direncanakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat”. Menurut Halim dan Kusufi (2014).

Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai pihak yang akan menjalankan roda pemerintahan dalam bentuk program-program, dituntut melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara baik dimana dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk dinilai oleh masyarakat apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Program-program yang telah dibuat tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, hal ini menimbulkan pemikiran untuk menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah, Dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang sering disebut desentralisasi. Desentralisasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan

reformasi cara pandang masyarakat di Indonesia yang telah menjadi fenomena bagi negara-negara di dunia. Menurut Halim (2012;142) bahwa “Reformasi keuangan daerah menuntut penyusunan anggaran dengan pendekatan/sistem anggaran kinerja, dengan penekanan pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi pada *output* dan *outcome*. Reformasi keuangan daerah secara esensi menuntut adanya perubahan dalam proses penyusunan menggunakan anggaran berbasis kinerja”. Sedangkan Mardiasmo (2009;56) mengungkapkan bahwa “Penganggaran sektor publik berhubungan dengan kebijakan dan prioritas dalam menentukan program kegiatan. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja”. Dampak dari desentralisasi memunculkan berbagai macam urusan pemerintah yang selama ini dipegang oleh pemerintah pusat, kini menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah. Pasca reformasi, banyak bermunculan tuntutan daerah untuk meminta kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangan di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilatar belakangi dari lahirnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaporan pertangungjawaban pengelolaan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Menurut Sutaryo,dkk (2010;68) bahwa “Penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk laporan realisasi anggaran merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas.”

Anggaran pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan otonomi. Keberadaan anggaran bagi Pemerintah daerah merupakan cerminan program kerja daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan semua SKPD. Dalam persiapan penyusunan anggaran, Pemerintah daerah perlu menyiapkan program kerja yang hendak dicapai. Namun demikian, dalam penyusunan anggaran masih sering ditemui ketidakefisienan dalam menentukan jumlah anggaran.

Arta Sadjiarto (2010;146) menyatakan bahwa “keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatiannya pada hasil yang didapat serta memberikan evaluasi yang benar

terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program yang lebih dibutuhkan masyarakat”.

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam menganalisis perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD.” Rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio Derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian” Mahmudi (2016;140).

Lebih lanjut Mahmudi (2016;140) mengungkapkan bahwa “Rasio derajat desentralisasi adalah rasio yang melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi yang ditunjukkan dengan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Sedangka Rasio ketergantungan Keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau propinsi. Rasio Kemandirian daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa mandirinya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya”.

Meskipun tergolong daerah yang masih muda, namun Bolaang Mongondow Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari bolaang mongondow induk, ini sudah berbenah diri dan saat ini mempunyai segudang tugas dan tantangan dalam mengembangkan pembangunan dimasa yang akan datang. Pemerintah yang ada terus menata penyelenggaraan kepemerintahan dengan baik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh

karena itu penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah dari tahun 2015 – 2018 seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Table 1.1

Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2015 - 2018

Ket. Realisasi	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
PAD	16.014.914.464	18.191.944.707	23.707.801.602	17.840.935.776
Total Pendapatan Daerah	514.132.589.383	627.759.083.489	599.363.710.833	591.049.611.191
Transfer Pusat	439.216.801.216	543.193.737.381	490.553.426.418	482.374.768.420
Transfer Pusat lainnya	53.226.636.000	55.271.355.200	71.628.797.000	67.560.601.000
Pendapatan Transfer	498.117.674.919	604.567.138.782	575.655.909.231	564.261.115.415

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan 2015-2018.

Tampak pada tabel bahwa Pendapatan Asli Daerah telah mengalami fluktuasi dimana tahun 2015 bernilai Rp 16.014.914.464, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi Rp 18.191.944.707, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp 23.707.801.602 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 17.840.935.776. Berdasarkan data diatas dimana sumbernya diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dari data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi diatas yaitu mengapa di tahun 2018 laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.**Analisis perkembangan Kinerja Keuangan pada Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2015-2018**

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangodow selatan dari tahun 2015-2018
- b. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dari tahun 2015-2018
- c. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Kemandirian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dari tahun 2015-2018

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2015-2018 berdasarkan perhitungan Rasio.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangodow selatan dari tahun 2015-2018
- b. Untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupatten Bolaang Mangondow Selatan dari tahun 2015-2018
- c. Untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Kemandirian pada Pemerintah Daerah Kabupatten Bolaang Mangondow Selatan dari tahun 2015-2018

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Memeberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Pemerintahan, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi maupun bahan masukan dalam meyajikan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang baik dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan juga memberikan tambahan informasi dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini kiranya dapat memberikan informasi tentang Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan juga bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam hal mengplikasikan teori-teori yang telah di dapat selama perkuliahan, dan diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya akuntasi pemerintahan adalah” aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), kususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan” Kustadi Arinta (2014;78)

Definisi Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli - Menurut Revisi Rond Baswir (2010;7), “Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba” Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2003) medefinisikan “akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasi, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut”.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Iskandar (2016;67) dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu:

- a. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai amanat konstitusi.

b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

c. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan operasional dan pemeriksaan manajerial.

2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah sebagai organisasi yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Prinip-prinsip atau standar akuntansi dan pelaporan menurut Koesnadi (2015;8) “prinsip dan standar dipergunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu dipergunakan, selain juga dari sisi pemakaian laporan keuangan. GASB (*Government Accounting Standard Board*) dari Amerika Serikat menggambarkan dalam exposure draftnya mengenai usulan konsep statement akuntansi pemerintahan, bahan sasaran dan

lingkungan harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi standar pelaporan yang ada dan praktik-praktik yang akan dikembangkan di masa mendatang”.

Govenment Financial Officers Association dalam buku *Government Accounting, Auditing and financial Reporting* mengemukakan bahwa “untuk dapat memahami model akutansi pemerintahan dengan tepat, diperlukan pertimbangan tiga hal sebagai berikut :

a. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintah demokratis, struktur pemerintahan biasanya berdasarkan sistem *check and balance* yang dilakukan dengan pemisahan fungsi pemerintah (eksekutif legislatif, dan yudikatif). Ketiga kelompok itu bisa memiliki simpulan yang berbeda mengenai bagaimana warga negara dilayani dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Disektor dunia usaha swasta, fokus perhatian hanya pada maksimalisasi laba, sedang kesuksesan atau kegagalan pemerintah tidak hanya diukur dari *bottom line* (saldo laba) saja, tetapi diukur dengan mutu pelayaan dan efisiensi/kehematian penggunaan dananya. Dengan demikian apakah sebuah pemerintahan mempunyai keuangan yang baik atau yang buruk tidak dapat diwajibkan dengan mudah dalam batas-batas akuntansi dan laporan keuangan saja.

b. Sifat Dari Sumber Daya

Disektor dunia usaha swasta, terdapat hubungan langsung antara barang dan jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar pembeli. Disektor pemerintahan, hal tersebut tidak ada. Kita sangat sulit mengidentifikasi hubungan

pertukaran antara pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima. Sebagai individu, tidak akan pernah menerima sejumlah barang atau jasa yang sama dengan jumlah pajak yang dibayar. Pembayaran pajak bersifat pemberi sumber dana yang tidak sukarela, dan bila diberi pilihan, akan memilih untuk tidak membayar pajak.

c. Proses Politik Memegang Peranan Penting

Dalam Negara Demokrasi, dimana rakyat melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Masyarakat meminta kepada pemerintah agar memberikan jasa yang maksimum kepada mereka dengan jumlah pembayaran pajak yang minimum. Selain itu tidak seperti pada sektor swasta, pemerintah harus menginfestasikan sejumlah dana dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan pendapat seperti taman-taman, jalan-jalan, bangunan umum dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut diatas menjadi alasan perlunya akuntansi pemerintahan tersendiri terpisah dari akuntansi perusahaan”.

2.1.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik khusus dari akuntansi pemerintahan adalah menggunakan istilah dana (*fund*), sehingga sering disebut sebagai akuntansi dana. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Pengertian dana dalam akuntansi pemerintahan menurut Mahmudi (2016;57) adalah satuan “akuntansi dan fiskal (*fiscal and accounting entity*) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas dan sumber-sumber keuangan dan beserta segala kewajiban yang berkaitan dan sisa modal atau saldo-saldo, dan

perubahan-perubahannya, yang dipisahkan dengan maksud melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan, restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan tertentu”.

Akuntansi pemerintahan secara umum melayani dua tujuan yang luas yaitu” akuntabilitas (*accountability*) dan informasi untuk manajemen. Namun demikian tidak terdapat model atau desain tunggal untuk suatu sistem akuntansinya dan untuk pelaporan keuangan pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti persyaratan dan pembatasan oleh peraturan dan hukum, nilai budaya dan tradisi serta faktor-faktor lainnya. Hal-hal itu semua akan sangat mempengaruhi baik sistem akuntansinya dan pelaporan keuangan pemerintah maupun prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterapkan oleh suatu negara”.

2.1.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010/14) Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah” sebagai berikut :

(a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :

1. bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan;
2. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
3. pengaruh proses politik;
4. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

(b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian :

1. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
2. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
3. kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
4. penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah”.

2.1.6 Teori Anggaran

Mardiasmo (2009;61) anggaran merupakan “pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Negara/daerah sebagai suatu entitas sektor publik juga memanfaatkan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagaimana disebutkan dalam teori kebijakan, bahwa dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut mengandung dua ranah administrasi dan ranah politik. Demikian juga dengan kebijakan anggaran sangat dipengaruhi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan politik, begitu banyak kepentingan yang harus dialokasikan menurut keinginan pihak-pihak tertentu yang masing-masing ingin diprioritaskan”. Rubin (2014;123) menggambarkan “*budgetting as a special corner of politics, with many of its own characteristics*”. “Penganggaran sebagai sudut politik khusus, dengan banyak karakteristiknya sendiri.

Meskipun demikian anggaran publik atau anggaran pemerintah ini yang merefleksikan banyak kepentingan didalamnya, tetap saja merupakan salah satu instrumen vital dalam pencapaian tujuan negara. Hackbart dan Ramsey (2012;67) dalam “The Theory of the Public Sector Budget: An Economics Perspective mengatakan :

“The budget is a reflection of and the means by which the basic goals of government and society are achieved. The budgetary process is complicated by the fact that we often try to achieve separate policy goals through the use of one policy instrument: the budget”.

“Anggaran adalah cerminan dan sarana yang menjadi tujuan dasar pemerintah dan masyarakat tercapai. Proses anggaran diperumit oleh kenyataan bahwa kita sering mencoba mencapai tujuan kebijakan yang terpisah melalui penggunaan satu instrumen kebijakan: anggaran”.

Serta sebagaimana yang diungkapkan oleh Shah and Shen :

“public budgeting system are intended to fulfill several important functions. These functions include setting budget priorities that are consistent with the mandate of the government, planning expenditure to pursue a long-term vision for development, exercising financial control over inputs to ensure fiscal discipline, and providing tools for making government performance accountable to citizens”.

Sistem penganggaran publik dimaksudkan untuk “memenuhi beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini mencakup penetapan prioritas anggaran yang sesuai dengan mandat pemerintah, merencanakan pengeluaran untuk mengejar

visi jangka panjang untuk pembangunan, menjalankan kontrol finansial atas masukan untuk memastikan disiplin fiskal, dan menyediakan alat untuk membuat kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negara”.

2.1.7 Pengertian Anggaran Daerah

Istilah anggaran secara etimologis berasal dari bahasa latin *budga* atau *budge* (bahasa Inggris) dan *etat de roi, bouquette/bouge* (Perancis), dalam bahasa Belanda, disebut *begroting (grotten)*, yang bisa diartikan memperkiakan.

Definisi anggaran menurut Mikesell (2017) :

“ Budgeting is the process of planning, adopting, executing, monitoring, and auditing the fiscal program for the government for one or more future years”.

“Penganggaran adalah proses perencanaan, pengadopsian, pelaksanaan, pemantauan, dan audit program fiskal untuk pemerintah untuk satu atau beberapa tahun kedepan”.

Anggaran sektor publik adalah “pertanggungjawaban dari manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik” Sujarweni (2015;45). Menurut *Government Accounting Standards Board* (GASB) mendefinisikan anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 dinyatakan bahwa “anggaran pemerintahan merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, “anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan, namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkan anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Menurut standar Akuntansi Pemerintah (2010:8), fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangankan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik”.

Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas”.

2.1.8 Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009;62) “anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter”. Sumarsono (2009;57) bahwa “penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik”.

a. Tujuan dan fungsi Anggaran dalam system Keuangan Daerah

Tujuan pembuatan anggaran yaitu “untuk perencanaan secara konseptual yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Adapun fungsi anggaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu fungsi perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan anggaran sebagai pedoman kerja. Keempat fungsi tersebut masing-masing memiliki tujuan yang

telah ditetapkan. Peran anggaran daerah berdasarkan fungsi utamanya dijabarkan sebagai berikut Mardiasmo (2009;88) bahwa “:

1. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk “:
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 - b. Merencanakan bebagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strateg”.
2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk :
 - a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran.
 - b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemda.
 - c. Mencegah adanya *overlapping, understanding*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
 - d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk “menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas,

dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut, anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau pengguna dana publik”.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi “antar unit kerja dalam organisasi pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inskonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara unit kerja.
6. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen pemda kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Kinerja Pemda akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.
7. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisiensi dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable atau demanding but achievable*. Maksudnya target kinerja ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah”).

b. Jenis-Jenis Anggaran

Sujarweni (2015;67) bahwa “Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Anggaran Operasional, anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi. Belanja operasi tidak untuk menambah aktiva dan masa manfaatnya hanya satu periode.
2. Anggaran Modal, anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk menunjang aktivitas organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja Modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun”.

2.1.9 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Mardiasmo (2009) merupakan” instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja”.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang keuangan negara. Dalam hal penyusunan kementerian yang menangani urusan pemerintahan

perencanaan pembangunan dan yang menangani urusan keuangan membuat pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya”.

Kementerian Keuangan (2014) APDB merupakan “rencana pendapatan, belanja daerah, dan pemiayaan untuk satu tahun. APBD juga merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh pemerintah daerah, dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah.

Semua penerimaan di daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekorasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Peraturan pemerintah dalam negri (pemendagri) 13 tahun 2006 “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APDB. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksanaan dan pengeawasan keuangan daerah”

2.1.10 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki fungsi :

1. Fungsi otorisasi,mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah”.

2.1.11 Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah

Penjelasan dalam undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara terdapat Prisip-prinsip dasar (azaz) yang berlaku dibidang pengelolaan Anggaran Daerah. Adapun tentang “Perbendaharaan Negara, yaitu :

1. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas
6. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.

2.1.12 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah” dijelaskan mengenai struktur APBD yaitu :

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah

Struktur APBD sebagaimana dimaksud diatas diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Tabel 2.1
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

“Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan; d. Lain-Lain PAD yang Sah
	Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagi Hasil Pajak; b. Bagi Hasil Bukan Pajak; c. Dana Alokasi Umum; d. Dana Alokasi Khusus
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Hibah; b. Dana Darurat; c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya; d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah; e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; f. Lainnya yang di tetapkan Pemerintah Derah
Belanja Daerah	Belanja Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Bunga; c. Belanja Subsidi; d. Belanja Hibah; e. Belanja Bantuan Sosial; f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kecamatan; g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; h. Belanja Tidak Terduga
	Belanja Langsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal
Pembayaran	Penerimaan Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya; b. Pencairan dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	Pengeluaran Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dana Cadangan; b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; c. Pebayaran Pokok Utang; dan d. Pemberian Pinjaman”

Sumber : *Profil Daerah Kabupaten Bolaangmangondow selatan.*

Definisi menurut Permendagri 13 Tahun 2006 yaitu” :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah meliputi “semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah”.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi “semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”.

a. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Urusan wajib adalah “urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kebijakan, dan potensi keunggulan daerah.

Belanja penyelengaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum layak

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanga”.

b. Klasifikasi Belanja

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

a) Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

b) Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari” :

1. Klasifikasi berdasarkan urusan oemerintahan;

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara”.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan Negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari “:

1. Pelayanan Umum;

2. Ketertiban dan Keamanan;

3. Ekonomi;

4. Lingkungan Hidup;

5. Perumahan dan Fasilitas Umum;

6. Kesehatan;

7. Pariwisata dan Budaya;
 8. Agama;
 9. Pendidikan; serta
 10. Perlindungan Sosial”.
- c) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d) Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari” :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa;
 3. Belanja Modal;
 4. Bunga Subsidi;
 5. Hibah;
 6. Bantuan Sosial;
 7. Belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan;
 8. Belanja tak terduga”.

Penganggaran dalam APBD untk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah adalah “semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutupi defisit”.

2.1.13 Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2010 : 1) “ Analisis Kinerja keuangan adalah manifater keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di kinerja operasional”. Sedangkan menurut Halim (2012;127) “Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia” Adapun menurut Agnes (2015;1) “Kinerja keuangan merupakan gambaran umum mengenai kondisi dan prestasi keuangan perusahaan yang terjadi pada masa lalu berdasarkan aporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan yang telah terjadi.”

Mardiasmo (2009:121) setelah operasionalisasi anggaran adalah “pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan seadar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi”.

Berdasarkan pengertian diatas maka pengukuran kinerja merupakan suatu prestasi keuangan yang menunjukkan manifestasi keberhasilan dan kegagalan

operasional sehingga menjadi perestasi keuangan pada masa lalu berdasarkan laporan keuangan.

Mardiasmo (2009;79) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut Mardiasmo (2002) ‘Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan”.

Analisis rasio keuangan menurut Kuswadi (2016;2) merupakan “cara menganalisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan data atas kualitatif. Sedangkan menurut Sofyan (2018;297) “Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dan hasil perbandingan dari satu laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.” Menurut Mahmudi (2016;90) bahwa analisis rasio keuangan merupakan perbandingan

antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan.”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio keuangan adalah analisis yang membandingkan pos laporan keuangan satu dengan pos laporan keuangan lainnya yang berguna untuk mengetahui penilaian posisi atau kondisi perusahaan saat ini.

Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Rasio keuangan APBD dapat menilai tingkat ketercapaian sesuai dengan tujuan organisasi. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Mahmudi (2016;140) untuk” menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan:

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi` Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Deseentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 2.2
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Percentase (%)	Kategori
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Halim (2012)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan / atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio KKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan

Daerah

Percentase (%)	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Halim (2012)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan

jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut”:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{pinjaman}}$$

Tabel 2.4

Skala Interval Rasio Kemandirian

Percentase (%)	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

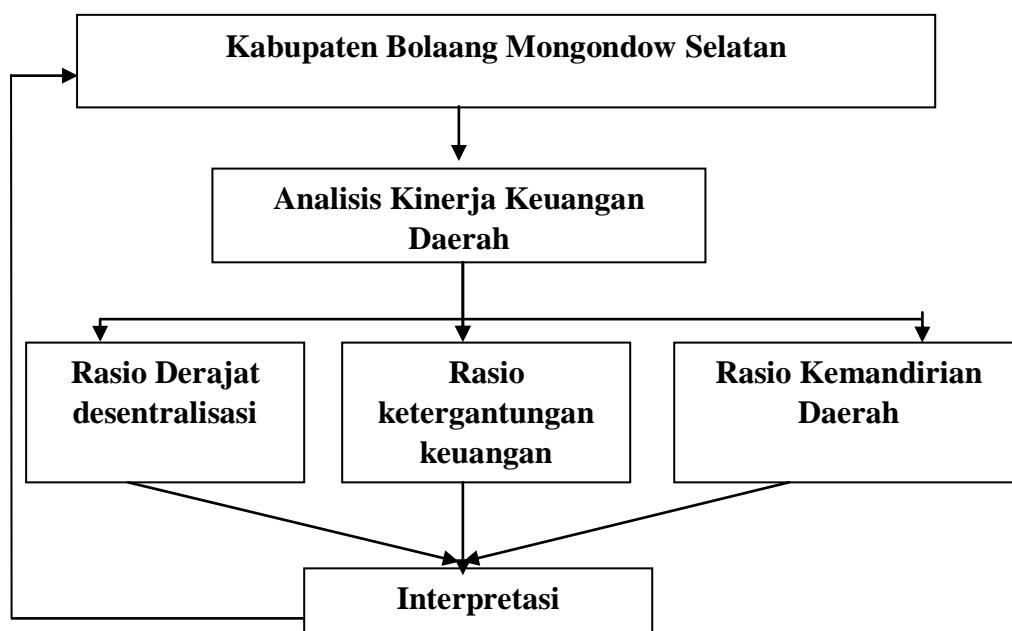
Sumber : Halim (2012)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah Bolaang Mangodow Selatan merupakan daerah otonomi yang sedang melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dari segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Sebagai daerah yang berasaskan desentralisasi tentu berusaha memperlihatkan kinerja yang baik . Kinerja yang baik dapat diketahui dengan menganalisis laporan keuangan Salah satu alat yang dapat digunakan dalam menganalisis perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD.” Rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data

keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio Derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian” Mahmudi (2016;140).

Hal ini ditunjukkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini:



Gambar 2.2
Kerangka pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dari uraian Latar belakang dan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 .

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif berupa analisis rasio. Analisis Rasio yang diimplementasikan adalah Rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian, digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2015 sampai dengan 2018.

3.2.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait pada instansi yang menjadi lokasi penelitian. Sedangkan Data

Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka baik itu laporan keungan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian”.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, seperti Pimpinan serta staf. Data Primer bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui **Badan PengelolaanKeuangan Dan Pendapatan Daerah(BPKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperlukan dengan tujuan melengkapi data primer. Data Sekunder didapatkan dari pengkajian perpustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar-standar dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan data keuangan dan laporan keuangan tahun 2015,2016,2017 dan 2018 yang berasl dari **Badan PengelolaanKeuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

3.2.3 Definisi Operasional variabel

Adapun Arah penelitian ini adalah untuk mengukur dan menginterpretasikan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian. Sehingga Operasional yang digunakan dalam landasan berpikir penelitian ini dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Operasional Variabel penelitian

Variabel	Dimensi	Rumus	Skala
Analisis Kinerja Keuangan	Derajat Desentralisasi	$\text{Derajat Deseentralisasi}$ $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Rasio
	Ketergantungan Keuangan Daerah	$\text{Rasio ketergantungan keuangan}$ $= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
	Kemandirian Keuangan	$\text{Rasio Kemandirian Daerah}$ $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{pinjaman}}$	Rasio

Sumber : Mahmudi (2016:140)

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini” adalah:

1. Observasi yaitu mengamati hal-hal yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.
2. Interview yaitu mengadakan langsung dengan petugas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”.

3.2.5. Metode Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat tabel target dan realisasi serta biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan masing-masing item pos pajak daerah,yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.
2. Menyusun Tabel Analisis Efektivitas masing-masing Item Pos Pendapatan dan transfer serta pinjaman.,

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dirumuskan dengan menggunakan pendapat Mahmudi (2016;140) “sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan Asli Daerah dengan Total penerimaan Daerah. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Deseentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Untuk menghitung Rasio ini dapat digunakan dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio KKD = \frac{Pendapatan Transfer}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah penerimaan transfer serta pinjaman. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio Kemandirian Daerah = \frac{Pendapatan Asli Daerah}{Transfer pusat + Propinsi + pinjaman}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Keuangan dan Aset Daerah **pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan** telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2013 sebagai realisasi dari pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kesatuan/ rangkaian yang muncul kemudian sebagai konsekuensi logis atas berdirinya daerah otonom baru, sebagaimana dibuktikan secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara”.

Sebagaimana daerah administrasi baru lainnya, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka tentunya Daerah, Kabupaten/Kota membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkatan daerah sesuai dengan urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pada awalnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terbentuk melalui Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2013, memiliki tugas pokok dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah. Secara hierarki, struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipimpin oleh 1 (*satu*) Kepala Dinas/ Pejabat setingkat Eselon II, 1 (*satu*) Sekretaris dan 5 (*lima*) Kepala Bidang / Pejabat setingkat Eselon III, 13 (*tiga belas*) Kepala Seksi/ Pejabat setingkat Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional”.

Dalam perkembangannya, DPPKAD kemudian pada Tahun 2016 berubah nomenklatur dinas menjadi Badan Keuangan dan akhirnya pada Tahun 2017 akhir berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan Komposisi Struktur di bawah Kaban: Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kasubag; 6 (enam) Kepala Bidang dengan 17 (tujuh belas) Kasubid yang tersebar di tiap bidangnya”.

4.1.1. Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi

Sejak awal berdiri pada Desember 2008 s/d Sekarang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

“telah 7 (*tujuh*) kali mengalami pergantian Kepemimpinan. Menginjak tahun ke-8 dalam perjalanan organisasi, BPKPD banyak mengalami perubahan yang cukup dinamis di tengah silih bergantinya pemimpin yang sempat mewarnai dan memperkaya organisasi menuju kearah yang lebih baik, tentunya dengan satu tujuan utama yakni terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntable”.

Adapun periode kepemimpinan BPKPD dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 1 Nama Pejabat dan Periode

No.	Nama Pejabat	Periode Kepemimpinan s/d		Ket.
1.	Drs. ALI PAPUTUNGAN	DES 2008	MEI 2009	
2.	ALEX SARANAUNG, SP, M.Si	MEI 2009	AGST 2010	
3.	Ir. RONNY W. SUMILAT	AGST 2010	DES 2010	Plt.*
4.	MULYADI TAYEB, SE, MM	DES 2010	JAN 2011	Plt.*
5.	BERLIAN POTABUGA, SH, M.Si	JAN 2011	FEB 2013	
6.	Drs. GUNAWAN M. LOMBU, S.Pd	FEB 2013	MEI 2013	Plt.*
7.	MARZANZIUS A. OHY, S.STP	MEI 2013	JAN 2018	
8.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME	JAN 2018	SEKARANG	

- *Plt: Pelaksana Tugas*

BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada periode awal kepemimpinan “Drs. Ali Paputungan lebih difokuskan pada penyiapan Sarana dan Prasarana penunjang kantor seperti penyiapan ruang/bangunan kantor, dengan

memanfaatkan 2 unit ruang kelas SDN 1 Molibagu untuk dijadikan kantor sementara, tentunya dengan fasilitas berupa meja dan kursi yang seadanya pula. Periode tahun 2008- 2009 ini pula BPKPD sedang merintis penerapan aplikasi Simda Keuangan dalam hal peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bekerja sama dengan pihak BPKP perwakilan Provinsi SULUT untuk penyiapan sarana dan prasarana; penginstallan dan maintenance perangkat *Software* beserta *Hardware*-nya dan mengadakan pendidikan/pelatihan tentang pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah Keuangan”.

Penerapan Simda “Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kemudian lebih dimantapkan lagi di masa kepemimpinan, Alex Saranaung, SP, M.Si, dengan menyelenggarakan Bimtek tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang melibatkan seluruh Pejabat pengelola keuangan SKPD, selain itu beliau juga mulai memperkuat organisasi DPPKAD baik secara struktur maupun dari segi SDM di tengah tantangan keterbatasan Sarana dan Prasarana serta Ketersediaan SDM yang benar-benar siap dan dibutuhkan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Usaha-usaha yang telah dirintis dan dijalankan oleh kedua pimpinan terdahulu kemudian dilanjutkan kembali oleh kedua Pejabat selanjutnya, yakni Ir. Ronny W. Sumilat (Agustus 2010 s/d Desember 2010) dan Mulyadi Tayeb, SE, MM (Desember 2010 s/d Januari 2011) meskipun status keduanya hanya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”.

Setelah pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka Bupati pertama pilihan rakyat, yaitu Bapak Hi. Herson Mayulu, S.Ip dengan Wakilnya Bpk. (Alm.) Drs. Samir Badu, M.PD, kemudian berkomitmen pada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan Pemerintahan yang baik dan Tata pemerintahan yang bersih, kemudian menunjuk Berlian Potabuga, SH, M.Si sebagai *srikandi* pertama untuk memimpin BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, adapun prestasi yang pernah dipersembahkan oleh Berlian antara lain, diterapkannya SIMDA-Gaji untuk pengelolaan seluruh PNS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dimulainya proses inventarisasi/pencatatan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada masa ini pula terjadi perubahan komposisi struktur Dinas di tingkatan Eselon III, dari sebelumnya Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipecah menjadi 2 (dua) bidang yakni, Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan. Masa kepemimpinan Berlian Potabuga selama ± 2 (dua) tahun berakhir dan kemudian digantikan oleh Drs. Gunawan M. Lombu, S.Pd,MM sebagai Pelaksana tugas setelah berakhirnya jabatan Sekretaris Daerah yang diemban beliau dikarenakan memasuki masa pensiun. Pada masa kepemimpinannya, beliau lebih fokus terhadap perbaikan dan peningkatan system pelayanan pengelolaan keuangan daerah”.

Marzanzius Arvan Ohy, S.STP adalah Kepala BPKPD yang menjabat menggantikan Drs. Gunawan M. Lombu, S.Pd, MM yang telah memasuki masa pensiun. Sosok pejabat yang merupakan alumni STPDN Jatinangor Tahun 1995 ini dilantik medio Mei 2013 hingga Sekarang. Di awal kepemimpinannya beliau

melakukan penataan organisasi dengan menambah 1 seksi di bidang Pendapatan, yakni Seksi Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB, sebagai bentuk kesiapan Dinas dalam menyambut agenda Diserahkannya Pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Pusat ke Daerah. Adapun progress yang dicapai BPKPD pada masa kepemimpinan beliau adalah sbb”:

a. Bidang Pendapatan:

- 1) Pengadaan *Hardware* dan *Software* PBB-P2 untuk menunjang pengelolaan PBB-P2;
- 2) Suksesnya penyerahan PBB-P2 oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Bolsel;
- 3) Salah satu daerah yang tercepat menyerahkan form SPPT dan DHKP ke Desa, di antara 15 (lima belas) Kab/Kota se-Provinsi SULUT;
- 4) Penerapan SIMDAl Pendapatan untuk mengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Bidang Anggaran:

- 1) Pelatihan Penerapan SIMDAl Desa untuk memudahkan desa dalam mengelola Dana Desa;
- 2) Daerah pertama di SULUT dan salah satu yang terbaik di tingkat Nasional yang mengelola APBDes dan ADD;
- 3) Beberapa kali Menjadi Kabupaten yang ke-2 setelah Bitung dalam Pembahasan APBD/P dengan pihak Provinsi melalui Bid. Bina Kabupaten/Kota BPK-BMD Prov. SULUT;

c. Bidang Perbendaharaan:

- 1) Semakin meningkatnya pelayanan perbendaharaan di BPKPD;
- 2) Semakin tertibnya administrasi keuangan daerah; dan

3) Penerapan SIM Taspen

d. Bidang Akuntansi:

- 1) Menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual;
- 2) Semakin baiknya system pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- 3) Opini WTP atas LKPD Tahun 2014;
- 4) Opini WTP atas LKPD Tahun 2015.

e. Bidang Aset:

- 1) Diterapkannya SIMDA-Aset;
- 2) Dilaksanakannya revaluasi/appraisal asset;
- 3) Semakin meningkatnya system pencatatan asset;
- 4) Diterimanya dana hibah dari pemkab Bolmong Induk

Capaian serta prestasi yang sudah diraih pada masa kepemimpinan Marzanzius A. Ohy, S.STP kemudian dipertahankan dan ditingkatkan pada masa kepemimpinan Lasya L Mamonto, S.Pt, ME diantaranya seperti:

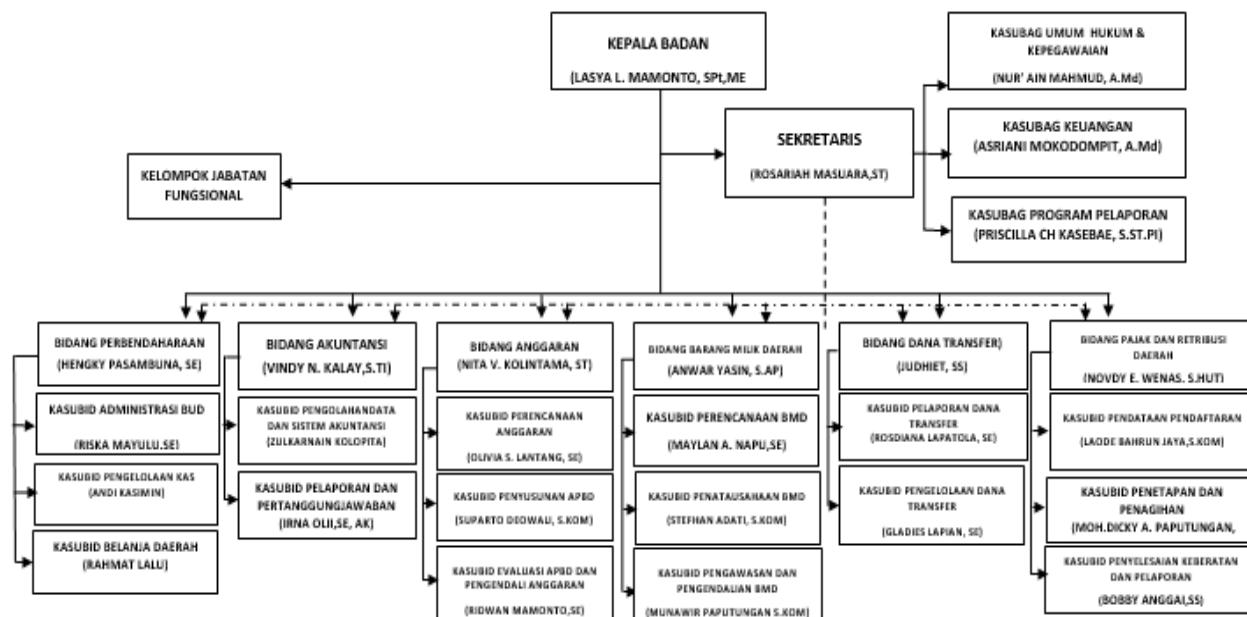
- a. Keberhasilan dalam mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, WTP;
- b. Penerapan *Cash Management System* (CMS) Kasda *Online* Versi 2.0;
- c. Ditingkatnya pengelolaan pembayaran PBB-P2 *Online*;
- d. Diluncurkannya Aplikasi monitoring PBB-P2 berbasis android OM OKU (*Online Monitoring Objek Pajak Terpadu*); dan
- e. Diterapkannya aplikasi perbendaharaan berbasis *web* SI VIBER (*Sistem Informasi Verifikasi Berkas*).

Seiring berjalannya waktu, di tengah silih bergantinya Pejabat yang memimpin, pasang-surutnya organisasi, hingga prestasi yang telah dicapai adalah sebuah dinamika dalam organisasi sebagai sebuah keniscayaan yang mewarnai perjalanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah yakni Mewujudkan Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Bermartabat, Berbudaya, Maju dan Sejahtera”.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi bertujuan untuk menjabarkan tugas pokok dari masing-masing unit kegiatan dalam suatu organisasi agar dapat menjalankan tugas yang telah di amanahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah, retribusi daerah menggunakan alat ukur berupa rasio, dengan data berupa laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk priode 2015, 2016, 2017 dan 2018. Pengelolaan data dibentuk dengan menggunakan MS. Execel, dengan hasil penelitian sebagai berikut.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Derajat Desentralisasi

Untuk mengetahui tingkat efektivitas antara target dengan realisasi penerimaan masing-masing pos pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Percentase (%)	Kategori
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Halim (2012)

Adapun Data Derajat Desentralisasi ditampilkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Komponen Rasio Derajat Desentralisasi

Komponen Rasio	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	16.014.914.464	18.191.944.707,7	23.707.801.602,8	17.830.846.026
Total pendapatan:	514.132.589.383	627.759.083.489,7	599.363.710.833,8	591.039.521.441

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria derajat desentralisasi di atas, Berikut ini adalah derajat desentralisasi untuk tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 2015 &= \frac{\text{Rp. } 16.014.914.464}{\text{Rp. } 514.132.589.383} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,0311 \text{ atau } 3,11\%} \\
 2016 &= \frac{\text{Rp. } 18.191.944.707}{\text{Rp. } 627.759.083.498} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,0290 \text{ atau } 2,90\%} \\
 2017 &= \frac{\text{Rp. } 23.707.801.603}{\text{Rp. } 599.363.710.834} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,0396 \text{ atau } 3,96 \%} \\
 2018 &= \frac{\text{Rp. } 17.830.846.026}{\text{Rp. } 591.039.521.441} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Rp. 591.039.521.441

$$= \textbf{0,0302 atau 3,02 \%}$$

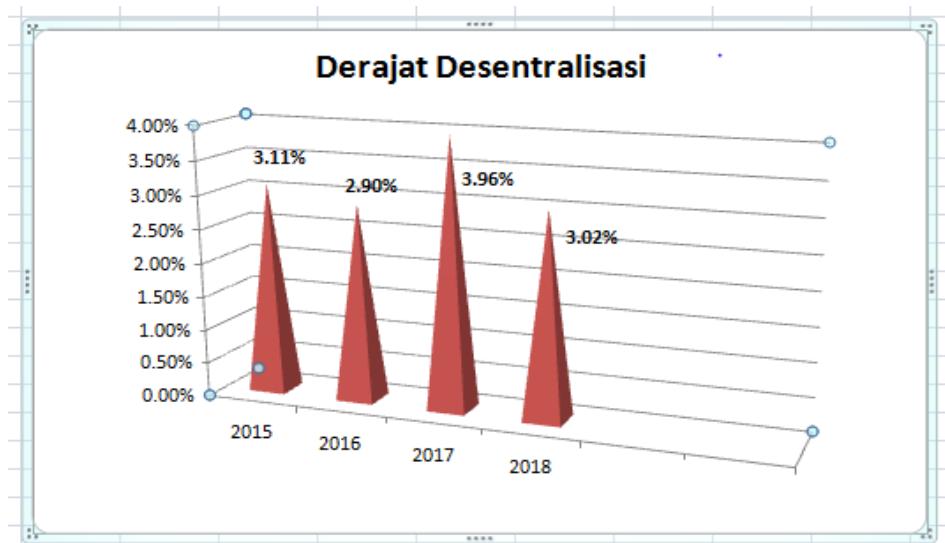
Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dapat diketahui bahwa masing-masing rasio dari tahun 2015 sebesar 3,11%, tahun 2016 sebesar 2,90%, dan tahun 2017 sebesar 3,96%, dan tahun 2018 sebesar 3,02%.

Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik 4.1

Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Tahun 2015-2018



Sumber: Data Olahan 2019

4.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan daerah

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi, dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun Skala interval untuk mengetahui kategori ketegantungan keuangan daerah menurut Halim (2012) dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.3
Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan

Daerah

Percentase (%)	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Halim (2012)

Untuk menilai tingkat ketergantungan keuangan daerah diperlukan data-data dari laporan realisasi anggaran yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Komponen Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah

Komponen Rasio	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Pendapatan transfer	498.117.674.919	604.567.138.782	575.655.909.231	564.261.115.415
Total pendapatanl: Daerah	514.132.589.383	627.759.083.489,7	599.363.710.833,8	594.939.521.441

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran

Berikut ini adalah perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah untuk tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria derajat desentralisasi di atas, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 2015 &= \frac{\text{Rp. } 498.117.674.919}{\text{Rp. } 514.132.589.383} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,9689 \text{ atau } 96,89\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{\text{Rp. } 604.567.138.782}{\text{Rp. } 627.759.083.490} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,9631 \text{ atau } 96.31 \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{\text{Rp. } 575.655.909.231}{\text{Rp. } 599.363.710.834} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,9604 \text{ atau } 96,04 \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{\text{Rp. } 564.261.115.415}{\text{Rp. } 594.939.521.441} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,9484 \text{ atau } 94,84 \%} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dapat diketahui dengan melihat masing-masing rasio. Pada tahun 2015 sebesar 96,89%, tahun 2016 sebesar 96,31%, tahun 2017 sebesar 96,04%, dan tahun 2018 sebesar 94,84%. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik 4.2
Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Bolaang Mangondow Selatan Tahun 2015-2018



Sumber: Data Olahan 2019

4.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan ini mengukur seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah Daerah dengan membandingkan jumlah PAD dengan

jumlah transfer baik dari pusat maupun propinsi dan pinjaman daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{pinjaman}}$$

Sedangkan untuk melihat kategori kemandirian maka dapat digunakan skala interval menurut Halim (2012) sebagai berikut:

Tabel 4.5

Skala Interval Rasio Kemandirian

Percentase (%)	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Halim (2012)

Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah diperlukan data-data

dari laporan realisasi anggaran yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.6

Komponen Rasio kemandirian keuangan daerah

Komponen Rasio	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	16.014.914.464	18.191.944.707,7	23.707.801/.602,8	17.830.846.026
Transfer pusat	439.216.801.216	543.193.737.381	492.607.526.629	482.374.768.420
Transfer Pusat lainnya	53.226.636.000	55.271.355.200	71.628.797.000	67.560.601.000

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria kemandirian keuangan daerah di atas, maka Berikut ini adalah perhitungan Rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dihitung sebagai berikut:

$$2015 = \frac{\text{Rp. } 16.014.914.464}{\text{Rp. } 439.216.801.216 + 53.226.636.000} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 16.014.914.464}{\text{Rp. } 492.443.437.216} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,0325 \text{ atau } 3,25 \%}$$

$$2016 = \frac{\text{Rp. } 18.191.944.708}{\text{Rp. } 543.193.737.381 + 55.271.355.200} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 18.191.944.708}{\text{Rp. } 598.465.092.581} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,0304 \text{ atau } 3,04 \%}$$

$$2017 = \frac{\text{Rp. } 23.707.801.603}{\text{Rp. } 492.607.526.629 + 71.628.797.000} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 23.707.801.603}{\text{Rp. } 564.236.323.629} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,0420 \text{ atau } 4,20 \%}$$

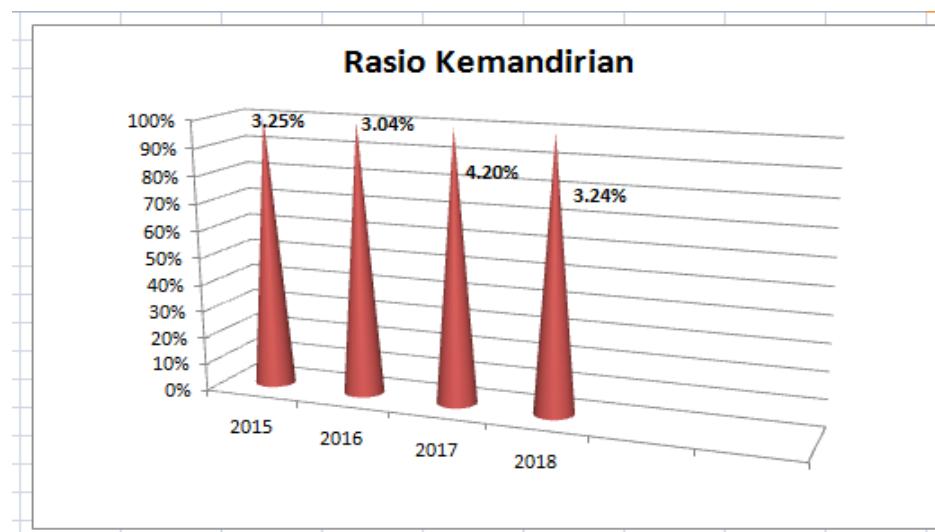
$$2018 = \frac{\text{Rp. } 17.830.846.026}{\text{Rp. } 482.374.768.420 + 67.560.601.000} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp. } 17.830.846.026}{\text{Rp. } 549.935.369.420} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,0324 \text{ atau } 3,24}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dapat diketahui masing-masing rasio tahun 2015 sebesar 3,25%, tahun 2016 sebesar 3,04%, tahun 2017 sebesar 4,20% dan tahun 2018 sebesar 3,24%. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik 4.3

**Perkembangan Rasio kemandirian keuangan daerah
Pemerintah Kota Bolaang Mangondow Selatan Tahun 2015-2018**



Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan gambar grafik 4.3 diatas maka sangat jelas menunjukan perkembangan rasio kemandirian keuagan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dalam empat tahun terakhir yakni tahun 2015-2018, dimana grafik tersebut menunjukan nilai rasio yang mengalami fluktuasi nilai rasio selama empat tahun terakhir yakni hingga di tahun 2018. Walaupan pada tahun 2017 sempat mengalami peningkatan angka rasio, akan tetapi nilai tersebut hanya sementara, dan kembali mengalami penurunan signfikan ditahun 2018

Terjadinya fluktuasi nilai rasio selama empat tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan , tentu menunjukan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana upaya Pemerintah Kabupaten didalam meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungannya dari sumber pendanaan pihak eksternal masih sangat rendah. Dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi serta sumber pendanaan yang sah lainnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Dilihat Dari Rasio Derajat desentralisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diruaikan sebelumnya, menunjukan nilai rasio Derajat Desentralisasi daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan tahun 2015-2018 masing-masing tahun 2015 sebesar 3,11%, tahun 2016 sebesar 2,90%, dan tahun 2017 sebesar 3,96%, dan tahun 2018 sebesar 3,02%.

Tinggi rendahnya tingakat Derajat Desentralisasi suatu daerah maka nilai rasionalya harus memenuhi standar atau ukuran Derajat Desentralisasi suatu

daerah, dimana menurut Halim (2012) skala interval Derajat Desentralisasi dapat digambarkan dalam table berikut:

Skala Interval Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Persentase	Derajat Desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 -30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Halim (2012)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan jika diukur dengan table skala interval derajat desentralisasi daerah, maka kriteria tingkat derajat desentralisasi akan tampak dalam table berikut:

Tabel 4.7

**Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan**

Tahun	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria
Tahun 2015	3,11%	Sangat Kurang
Tahun 2016	2,90%	Sangat Kurang
Tahun 2017	3,96%	Sangat Kurang
Tahun 2018	3,02%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan memiliki Derajat Desentralisasi untuk tahun 2015-

2018 masuk pada kriteria Sangat Kurang, selain itu juga, jika memperhatikan perkembangan hasil perhitungan nilai rasio menunjukan nilai rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan selama empat tahun terakhir, terus mengalami penurunan hingga di tahun 2018.

Untuk meningkatkan rasio Desentralisasi ini pemerintah harus lebih kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Hasi perhitungan dan perbandingan skala interval tingkat kemampuan keuangan, tentu memeberikan pengertian bahwa selama lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan mengalami flektuasi. PAD Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan belum mampu memberikan kotribusi yang cukup sebagai sumber pendanaan internal pemerintah Kabupaten dan sehingga belum mampu mengurangi sumber pendanaan eksternal baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini sangat jelas terlihat pada hasil nilai rasio kemandirian pada tahun 2018 pada angka 33,08%, yang memberikan pengeritan bahwa dari total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Tahun 2018, sebanyak 33,08% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan .

Pengukuran kinerja sector public tentunya dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah supaya biasa focus terhadap tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa Kontribuusi PAD yang diperikan untuk kabupaten masih sangat rendah pada hal

menurut Mahmudi (2016) bahwa semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Desentralisasi di Indonesia menurut Mahmudi (2016) dapat diwujudkan dalam kebijakan penting oleh pemerintahan transisi Habibie dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dimana Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua urusan rumah tangganya. Impiliasi langsung dari desentralisasi kewenangan kepeada pemerintah daerah yaitu dengan adanya peningkatan kebutuhan dana yang sangat besar. Kebuthan dana tersebut dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah. Realisasi Anggaran pendapataa Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bolaang Mangondow Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp 16.014.914.464 yang hanya bersumber dari pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sementara pajak hotel masih sangat rendah karena masih kurangnya pembangunan hotel karena kurangnya wisatawan baik local maupun asing yang berkunjung begirtu juga dengan pajak restoran yang belum memadai . Sedangkan untuk pajak retribusi hanya bersumber dari retribusi jasa umum dan dan jasa usaha serta pendapatan lain-lain yang sah. Begitu halnya ditahun 2016,2017 dan 2018. Sementara masih ada PAD yang belum difunsikan yaitu hasil perusahaan Milik daerah dan pengelolaan kekayaan daearah. Potensi ini harus di gali dan dikembangkan agar dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Dilihat Dari Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dapat diketahui masing-masing rasio tahun 2015 sebesar 96,89%, tahun 2016 sebesar 96,31%, tahun 2017 sebesar 96,04%, dan tahun 2018 sebesar 94,84%.

Hasil perhitungan diatas jika dibandingkan dengan Skala interval ketergantungan daerah menurut Halim (2012) dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

**Tabel 4.8
Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah**

Percentase (%)	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Halim (2012)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan jika diukur dengan table skala interval Ketergantungan Keuangan Daerah, maka kriteria tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah akan tampak dalam table berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Ketergantungan Daerah	Kriteria
Tahun 2015	96,89%	Tinggi
Tahun 2016	96,31%	Tinggi
Tahun 2017	96,04%	Tinggi
Tahun 2018	94,84%	Tinggi

Sumber: Data Olahan 2019

Tampak pada table bahwa ketergantungan pemerintah masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan atau Propinsi. Menurut Mahmudi (2016) semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau propinsi. Kondisi ini tentuu berpengaruh terhadap belanja modal dimana menurut halim bahwa seamakin tinggi ketergantungan keuangan suatu daerah maka semakin besar belanja modal yang dilakukan.

Dampak yang terjadi apabila rasio ini semakin tinggi maka sebagai salah satu tolak ukur kurangnya kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya. Apabila semakin kecil rasio ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelolah dan mengembangkan daerah sendiri dari sumber-sumber yang dimilikinya.

4.3.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Dilihat Dari Tingkat Kemandirian Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dapat diketahui masing-masing rasio tahun 2015 sebesar 3,25%, tahun 2016 sebesar 3,04%, tahun 2017 sebesar 4,20% dan tahun 2018 sebesar 3,24%.

Hasil perhitungan diatas jika dibandingkan dengan Skala interval kemandirian daerah menurut Halim (2012) dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.9
Skala Interval Rasio Kemandirian

Percentase (%)	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Halim (2012)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan jika diukur dengan table skala interval kemandirian keuangan daerah, maka kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah akan tampak dalam table berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian	Kriteria
Tahun 2015	3,25%	Rendah Sekali
Tahun 2016	3,04%	Rendah Sekali
Tahun 2017	4,20%	Rendah Sekali
Tahun 2018	3,24%	Rendah Sekali

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan memiliki tingkat kemandirian keuangan untuk tahun 2015-2018 masuk pada kriteria rendah sekali, walaupun pada tahun 2017 sempat mengalami kenaikan dengan nilai rasio 4,20% namun masih tetap tergolong rendah sekali. Selain itu juga, jika memperhatikan tren hasil perhitungan nilai rasio menunjukan nilai rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan selama empat tahun terakhir, mengalami fluktuasi hingga di tahun 2018.

Tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih sangat rendah, tampaknya pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relative lebih rendahnya basis pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pandapatan asli daerah yang dapat di gali oleh pemerintah daerah.

Hasil perhitungan dan perbandingan skala interval tingkat kemandirian, tentu memberikan pengeritan bahwa selama empat tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan terus mengalami peningkatan signifikan. PAD Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai sumber pendanaan internal pemerintah Kabupaten dan tentunya belum mampu mengurangi sumber pendanaan eksternal baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kondisi tersebut merupakan kinerja yang belum maksimal bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dalam pengelolaan sumber keuangan daerah dalam menuju daerah yang mandiri dan mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan serta mengurangi angka ketergantungan keuangan dari dana transfer pusat dan provinsi. Semakin besar nilai rasio kemandirian keuangan, maka semakin besar pula nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan. Perolehan PAD yang maksimal menunjukkan semakin baiknya perputaran ekonomi Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, serta semakin efektifnya pemerintah daerah didalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, baik itu dari pajak daerah, retribusi dan sumber PAD lainnya. Sehingga secara keseluruhan, jika didasarkan pada rasio kemandirian maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan selama empat tahun terakhir (2015-2018) memiliki kinerja yang belum optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika Ditinjau dari rasio Derajat Desentralisasi selama tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi dan masuk dalam criteria sangat rendah dimana derajat desentralisasi yang terendah pada tahun 2016 sebesar 2,90 % dan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 3,96%. Rendahnya derajat desentralisasi mengindikasikan masih belum optimalnya kinerja pemerintah dalam menggali dan mengelola potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
2. Jika ditinjau dari Rasio ketergantungan keuangan Daerah pada tahun 2015-2018 masuk dalam criteria sangat tinggi. Tingkat ketergantungan keuangan daerah yang terendah pada tahun 2018 sebesar 94,84% dan yang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 96,89%. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pusat karena memang kabupaten Bolaang Mangondow Selatan merupakan kabupaten yang baru berkembang.
3. jika ditinjau dari tingkat kemandirian keuangan selama tahun 2015-2018 masih termasuk dalam kategori rendah sekali dimanaa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan masih memiliki tingkat ketergantungan

sumber pendanaan dari pihak eksternal dan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah. Namun demikian, nilai rasio kemandirian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan mengalami fluktuasi dimana tingkat kemandirian yang terendah pada tahun 2016 sebesar 3,04% dan yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 4,20% keadaan yang berfluktuasi ini memberi gambaran kinerja yang belum maksimal dalam mencari sumber pendanaan daerah, serta secara perlahan mulai mengurangi pendanaan dari pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan disarankan agar dapat melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi yang di tunjukkan dengan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Selain itu juga bagi pemerintah daerah Bolaang Mongondow Selatan disarankan lebih menggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD yang besar dapat mengurangi ketergantungan dari pusat dan provinsi serta dapat meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan . Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan agar lebih memperhatikan keserasian belanja daerah, dimana porsi belanja pembangunan agar lebih ditingkatkan sehingga orientasi pembangunan

- daerah di Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan akan lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan lebih dapat ditingkatkan.
2. Bab peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian tentang analisis pertumbuhan dan aktivitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan. Sebab, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan merupakan kabupaten yang baru berkembang dengan tingkat perputaran keuangan yang relative rendah akan serta aspek sumber pendaanan daerah, PAD Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan masih tergolong rendah. Kondisi ini tentu kontrdiktif dengan realita, sehingga diduga ada banyak sumber-sumber PAD yang belum dioptimalkan pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta Sadjiarto 2010, *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*
- Agnes, H. (2015). *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arifin, 2012, *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
- Baswir, Revisiord, 2010, Akuntansi Pemerintah Daerah Indonesia, Edisi Ke Tujuh, BPFE,Yogyakarta
- Bachtiar Arif dkk (2003), *akuntansi pemerintahan*
- Dadang Suwanda , 2014, *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Salemba EmpatJakarta
- Darise, 2015, *Pengelolaan keuangan Daerah* : Jakarta Indeks.
- Elmi, 2010, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia* Salemba Empat Jakarta
- Gede Muhamad. 2013. *Akuntansi Pemerintahan. Cet.-5—Jakarta: LembagaPenerbit FEUI.*
- Halim dan Kusufi 2014, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Halim 2012, *Penyusunan Anggaran dan Analisi Keuangan*
- Halim, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah –SAP Berbasis Akrual*, Edisi 4 Jakrta Salemba Empat.
- Hackbart dan Ramsey 2012, *Anggaran*
- Iskandar 2016, *Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Bisnis*

Kementrian Keuangan 2014, *Rencana Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan*

Koesnadi 2015, *Prinsip dan Standar Akuntansi*

Koswara, 2009, *Peranan Administrasi Dalam Penyusunan Daerah, Widjaya Praja, Yogyakarta.*

Kuswadi 2016, *Cara Menganalisis Dengan Menggunakan Perhitungan*

Kustati Arinta 2014, *Hakekatnya Akuntansi Pemerintah*

Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarat.

Mardiasmo 2009, *Penganggaran Sektor Publik dan Operasionalisasi Anggaran*

Mardiasmo 2010, *Akuntasi Sektor Publik*, Edisi ke tiga, Cetakan pertama, Yogyakarta.

Margono. 2010. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah* , edisi Pertama.

Stanpress.

Mulyadi 2010, *Analisis Kinerja Keuangan*

Munawir S, 2010, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua,Liberty, Yogyakarta.

Mikesell 2017, *Definisi Anggaran*

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006” tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71. Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pilat, Juddy Jullian. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan Tahun Anggaran 2011 – 2015*. Jurnal Accountability Vol. 6 No.1: 2017.

Rubin 2014,*Penganggaran*

Rahmiyati, Anim. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal Ilmiah Eka Cida Dinamika Ekonomika. Vol 1. No. 1: 2014.

Sutaryo 2010, *Tujuan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan*
Sofyan 2018, *Analisis Rasio Keuangan*

Sofyan Syafri Harahap, 2011, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi keempat,Cetakan Tiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shan dan Shen, *Sistem Penganggaran Publik*

Standar Akuntansi Pemerintah 2010, *Karakteristik Tujuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangannya*

Sujarweni 2015, *Anggaran Sektor Publik*

Sumarsono 2009, *Penganggaran*

Tanjung Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah. Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang No 28 tahun 2009 tentang *pajak daerah dan Retribusi Daerah*

Undang – Undang No 23 tahun 2014, tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	%	REALISASI 2014
4	PENDAPATAN - LRA	520.733.497.541,00	514.132.589.383,00	98,73	382.915.552.194,64
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	15.226.749.630,00	16.014.914.464,00	105,18	12.276.185.314,85
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	6.855.824.201,00	7.688.436.432,00	112,14	3.097.113.342,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.570.821.123,00	1.638.967.612,00	104,34	820.505.847,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	159.063,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.800.104.306,00	6.687.510.420,00	98,34	8.358.407.062,85
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	505.506.747.911,00	498.117.674.919,00	98,54	370.633.412.631,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	444.077.014.316,00	439.216.801.216,00	98,91	347.716.533.304,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	9.803.355.000,00	7.895.987.950,00	80,54	11.835.048.210,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	9.986.585.316,00	7.033.739.266,00	70,43	5.554.517.356,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	306.923.904.000,00	306.923.904.000,00	100,00	284.610.597.738,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	56.842.370.000,00	56.842.370.000,00	100,00	45.716.370.000,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) - LRA	10.520.800.000,00	10.520.800.000,00	100,00	0,00
4 . 2 . 1 . 6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Yang Disetujui DPR RI – LRA	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	53.226.636.000,00	53.226.636.000,00	100,00	13.103.887.000,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	53.226.636.000,00	53.226.636.000,00	100,00	13.103.887.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	8.203.097.595,00	5.674.237.703,00	69,17	7.118.992.327,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	8.203.097.595,00	5.674.237.703,00	69,17	7.118.992.327,00
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	2.694.000.000,00
4 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	2.694.000.000,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LRA	0,00	0,00	0,00	5.954.248,79
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	5.954.248,79
5	BELANJA	524.835.779.612,30	462.418.282.473,00	88,11	366.993.746.168,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	305.889.190.507,30	271.951.216.813,00	88,91	240.281.903.991,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	156.707.587.595,30	140.747.975.815,00	89,82	117.942.349.384,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.078.942.912,00	112.389.140.998,00	87,07	115.541.554.607,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	17.345.000.000,00	16.829.000.000,00	97,03	1.370.000.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.757.660.000,00	1.985.100.000,00	71,98	5.428.000.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	217.946.589.105,00	190.034.574.905,00	87,19	126.360.848.477,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1.824.038.347,00	1.787.436.000,00	97,99	42.000.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.171.503.451,00	10.746.387.556,00	59,14	16.762.953.325,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.551.705.005,00	52.917.423.772,00	97,00	41.461.087.552,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.119.502.302,00	124.353.689.497,00	86,89	67.897.311.400,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	279.840.000,00	229.638.080,00	82,06	197.496.200,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	432.490.755,00	43,25	350.993.700,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	432.490.755,00	43,25	350.993.700,00
6	TRANSFER	49.929.977.828,00	49.395.189.335,00	98,93	15.514.668.213,00

6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		49.929.977.828,00	49.395.189.335,00	98,93	15.514.668.213,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		49.654.275.800,00	49.337.041.105,00	99,36	15.449.432.984,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		275.702.028,00	58.148.230,00	21,09	65.235.229,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(54.032.259.899,30)	2.319.117.575,00	(4,29)	407.137.813,64
7	PEMBIAYAAN					
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		54.032.259.899,30	54.032.259.899,30	100,00	54.625.122.085,66
7 . 1 . 1	Penggunaan SILPA		54.032.259.899,30	54.032.259.899,30	100,00	54.625.122.085,66
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		54.032.259.899,30	54.032.259.899,30	100,00	53.625.122.085,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	56.351.377.474,30	0,00	54.032.259.899,30

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, Juni 2016
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Hi. HERSON MAYULU, S.I.P.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	551.790.594.761,00	0,00	551.790.594.761,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	19.899.682.504,00	0,00	19.899.682.504,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.154.304.962,00	0,00	8.154.304.962,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.321.479.198,00	0,00	2.321.479.198,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	9.423.898.344,00	0,00	9.423.898.344,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	503.668.509.417,00	0,00	503.668.509.417,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	444.454.841.010,00	0,00	444.454.841.010,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	53.226.636.000,00	0,00	53.226.636.000,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.987.032.407,00	0,00	5.987.032.407,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	28.222.402.840,00	0,00	28.222.402.840,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	17.186.226.325,00	0,00	17.186.226.325,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	11.036.176.515,00	0,00	11.036.176.515,00	0,00
9	BEBAN	387.848.340.369,72	0,00	387.848.340.369,72	0,00
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	140.747.975.815,00	0,00	140.747.975.815,00	0,00
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	124.137.649.530,00	0,00	124.137.649.530,00	0,00
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	16.829.000.000,00	0,00	16.829.000.000,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	1.985.100.000,00	0,00	1.985.100.000,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	51.794.468.794,20	0,00	51.794.468.794,20	0,00
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	76.438.818,40	0,00	76.438.818,40	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	2.714.296.122,12	0,00	2.714.296.122,12	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	49.505.263.060,00	0,00	49.505.263.060,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	58.148.230,00	0,00	58.148.230,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	163.942.254.391,28	0,00	163.942.254.391,28	0,00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	163.942.254.391,28	0,00	163.942.254.391,28	0,00
8 . 5 . 1 9 . 4 . 1	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa	432.490.755,00	0,00	432.490.755,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(432.490.755,00)	0,00	(432.490.755,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	163.509.763.636,28	0,00	163.509.763.636,28	0,00

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, Juni 2016
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Hi. HERSON MAYULU, S.I.P.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN - LRA	663.467.540.550,00	627.759.083.489,70	94,62	514.132.589.383,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	19.358.254.442,00	18.191.944.707,70	93,98	16.014.914.464,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.862.885.142,00	8.432.636.644,00	85,50	7.688.436.432,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.558.646.759,00	1.811.913.500,00	70,82	1.638.967.612,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	50.223.541,00	50.223.541,00	100,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.886.499.000,00	7.897.171.022,70	114,68	6.687.510.420,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	644.085.686.108,00	604.567.138.782,00	93,86	498.117.674.919,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	579.947.989.368,00	543.193.737.381,00	93,66	439.216.801.216,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.788.656.774,00	11.586.971.759,00	148,77	7.895.987.950,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.357.813.594,00	2.293.235.277,00	97,26	7.033.739.266,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	351.325.965.000,00	351.325.965.000,00	100,00	306.923.904.000,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	218.475.554.000,00	177.987.565.345,00	81,47	117.363.170.000,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	55.449.137.000,00	55.271.355.200,00	99,68	53.226.636.000,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	55.449.137.000,00	55.271.355.200,00	99,68	53.226.636.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	8.688.559.740,00	6.102.046.201,00	70,23	5.674.237.703,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	8.688.559.740,00	6.102.046.201,00	70,23	5.674.237.703,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	23.600.000,00	5.000.000.000,00	21,186,44	0,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	23.600.000,00	5.000.000.000,00	21.186,44	0,00
5	BELANJA	618.686.108.484,30	542.052.015.823,00	87,61	462.418.282.473,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	353.538.926.893,30	317.101.445.446,00	89,69	271.951.216.813,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	179.421.582.307,00	158.984.192.472,00	88,61	140.747.975.815,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.530.744.586,30	154.684.592.974,00	91,24	112.389.140.998,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.564.000.000,00	1.085.000.000,00	69,37	16.829.000.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	3.022.600.000,00	2.347.660.000,00	77,67	1.985.100.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	263.857.001.591,00	224.413.587.877,00	85,05	190.034.574.905,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.766.620.000,00	2.264.792.750,00	81,86	1.787.436.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.456.162.548,00	17.780.069.080,00	79,18	10.746.387.556,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.717.653.425,00	36.784.416.697,00	97,53	52.917.423.772,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.840.865.618,00	167.508.739.500,00	83,40	124.353.689.497,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.700.000,00	75.569.850,00	99,83	229.638.080,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	1.290.180.000,00	536.982.500,00	41,62	432.490.755,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	1.290.180.000,00	536.982.500,00	41,62	432.490.755,00
6	TRANSFER	78.338.338.531,00	77.793.864.013,00	99,30	49.395.189.335,00
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	697.591.681,00	697.591.681,00	100,00	0,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	697.591.681,00	697.591.681,00	100,00	0,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	77.640.746.850,00	77.096.272.332,00	99,30	49.395.189.335,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	77.112.166.700,00	76.934.374.882,00	99,77	49.337.041.105,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	528.580.150,00	161.897.450,00	30,63	58.148.230,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.556.906.465,30)	7.913.203.653,70	(23,58)	2.319.117.575,00
7	PEMBIAYAAN				

7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.351.377.474,30	56.358.877.153,30	100,01	54.032.259.899,30
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	56.351.377.474,30	56.358.877.153,30	100,01	54.032.259.899,30
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.794.471.009,00	22.376.884.171,00	98,17	0,00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.512.151.000,00	2.386.203.931,00	94,99	0,00
7 . 2 . 8	Pembayaran Utang Jangka Pendek	20.282.320.009,00	19.990.680.240,00	98,56	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	33.556.906.465,30	33.981.992.982,30	101,27	54.032.259.899,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	41.895.196.636,00	0,00	56.351.377.474,30

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, Mei 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Hi. HERSON MAYULU, S.I.P.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	645.514.265.516,70	551.790.594.761,00	93.723.670.755,70	16,99
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	18.431.317.199,70	19.899.682.504,00	(1.468.365.304,30)	(7,38)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.651.750.223,00	8.154.304.962,00	497.445.261,00	6,10
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.828.376.580,00	2.321.479.198,00	(493.102.618,00)	(21,24)
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	50.223.541,00	0,00	50.223.541,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.900.966.855,70	9.423.898.344,00	(1.522.931.488,30)	(16,16)
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	617.471.334.139,00	503.668.509.417,00	113.802.824.722,00	22,59
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	545.196.348.987,00	444.454.841.010,00	100.741.507.977,00	22,67
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	66.099.205.200,00	53.226.636.000,00	12.872.569.200,00	24,18
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	6.175.779.952,00	5.987.032.407,00	188.747.545,00	3,15
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	9.611.614.178,00	28.222.402.840,00	(18.610.788.662,00)	(65,94)
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	9.611.614.178,00	17.186.226.325,00	(7.574.612.147,00)	(44,07)
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	11.036.176.515,00	(11.036.176.515,00)	(100,00)
9	BEBAN	463.374.138.502,33	387.848.340.369,72	75.525.798.132,61	19,47
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	158.984.192.472,00	140.747.975.815,00	18.236.216.657,00	12,96
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	158.028.681.076,00	124.137.649.530,00	33.891.031.546,00	27,30
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	1.085.000.000,00	16.829.000.000,00	(15.744.000.000,00)	(93,55)
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	2.347.660.000,00	1.985.100.000,00	362.560.000,00	18,26
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	63.926.320.027,00	51.794.468.794,20	12.131.851.232,80	23,42
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	263.386.490,33	76.438.818,40	186.947.671,93	244,57
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	993.389.190,00	2.714.296.122,12	(1.720.906.932,12)	(63,40)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	649.236.915,00	0,00	649.236.915,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	76.934.374.882,00	49.505.263.060,00	27.429.111.822,00	55,41
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	161.897.450,00	58.148.230,00	103.749.220,00	178,42
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	182.140.127.014,37	163.942.254.391,28	18.197.872.623,09	11,10
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00 182.140.127.014,37	0,00 163.942.254.391,28	0,00 18.197.872.623,09	0,00 11,10
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	536.982.500,00	432.490.755,00	104.491.745,00	24,16
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(536.982.500,00)	(432.490.755,00)	(104.491.745,00)	24,16
	SURPLUS/DEFISIT-LO	181.603.144.514,37	163.509.763.636,28	18.093.380.878,09	11,07

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, Mei 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Hi. HERSON MAYULU, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	594.623.648.878,00	599.363.710.833,75	100,80	627.759.083.489,70
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	15.742.379.577,00	23.707.801.602,75	150,60	18.191.944.707,70
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	6.695.077.577,00	4.669.445.524,00	69,74	8.432.636.644,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.055.070.000,00	798.905.781,00	38,87	1.811.913.500,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	336.058.655,00	0,00	50.223.541,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.992.232.000,00	17.903.391.642,75	256,05	7.897.171.022,70
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	578.881.269.301,00	575.655.909.231,00	99,44	604.567.138.782,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	490.316.716.164,00	492.607.526.629,00	100,47	543.193.737.381,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	6.767.847.947,00	7.208.583.563,00	106,51	11.586.971.759,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.140.887.787,00	9.152.830.625,00	221,04	2.293.235.277,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	348.334.434.000,00	348.334.434.000,00	100,00	351.325.965.000,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	131.073.546.430,00	127.911.678.441,00	97,59	177.987.565.345,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	80.750.597.000,00	71.628.797.000,00	88,70	55.271.355.200,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	80.750.597.000,00	71.628.797.000,00	88,70	55.271.355.200,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	7.813.956.137,00	11.419.585.602,00	146,14	6.102.046.201,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.813.956.137,00	11.419.585.602,00	146,14	6.102.046.201,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
5	BELANJA	534.730.592.378,00	480.708.258.815,68	89,90	542.052.015.823,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	356.020.356.270,00	318.514.348.559,00	89,47	317.101.445.446,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	168.078.872.834,00	150.572.631.169,00	89,58	158.984.192.472,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.834.073.436,00	155.545.836.890,00	89,48	154.684.592.974,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	4.920.910.000,00	4.634.864.500,00	94,19	1.085.000.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	9.186.500.000,00	7.761.016.000,00	84,48	2.347.660.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	175.889.575.111,00	161.319.148.806,68	91,72	224.413.587.877,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	685.000.000,00	35.000.000,00	5,11	2.264.792.750,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.002.325.420,00	14.122.796.311,00	83,06	17.780.069.080,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.201.654.990,00	37.772.077.543,77	93,96	36.784.416.697,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.219.669.297,00	108.854.374.821,91	92,86	167.508.739.500,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	780.925.404,00	534.900.130,00	68,50	75.569.850,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2.820.660.997,00	874.761.450,00	31,01	536.982.500,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2.820.660.997,00	874.761.450,00	31,01	536.982.500,00
6	TRANSFER	101.788.253.136,00	101.697.732.971,00	99,91	77.793.864.013,00
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	655.849.245,00	651.243.480,00	99,30	697.591.681,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	655.849.245,00	651.243.480,00	99,30	697.591.681,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	101.132.403.891,00	101.046.489.491,00	99,92	77.096.272.332,00
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	99.892.063.791,00	99.892.063.791,00	100,00	76.934.374.882,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	240.340.100,00	154.425.700,00	64,25	161.897.450,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.895.196.636,00)	16.957.719.047,07	(40,48)	7.913.203.653,70

7	PEMBIAYAAN				
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	41.895.196.636,00	42.066.017.737,40	100,41	56.358.877.153,30
		41.895.196.636,00	42.066.017.737,40	100,41	56.358.877.153,30
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	22.376.884.171,00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	2.386.203.931,00
7 . 2 . 8	Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	19.990.680.240,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.895.196.636,00	42.066.017.737,40	100,41	33.981.992.982,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	59.023.736.784,47	0,00	41.895.196.636,00

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, 28 Mei 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Hi. HERSON MAYULU, S.I.P.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	632.814.479.174,62	645.514.265.516,70	(12.699.786.342,08)	(1,97)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	24.150.561.587,62	18.431.317.199,70	5.719.244.387,92	31,30
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.538.315.168,00	8.651.750.223,00	(4.113.435.055,00)	(47,54)
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	813.630.910,00	1.828.376.580,00	(1.014.745.670,00)	(55,50)
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	862.664.636,00	50.223.541,00	812.441.095,00	1.617,65
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	17.935.950.873,62	7.900.966.855,70	10.034.984.017,92	127,01
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	573.723.987.295,00	617.471.334.139,00	(43.747.346.844,00)	(7,08)
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	490.553.426.418,00	545.196.348.987,00	(54.642.922.569,00)	(10,02)
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	71.628.797.000,00	66.099.205.200,00	5.529.591.800,00	8,37
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	11.541.763.877,00	6.175.779.952,00	5.365.983.925,00	86,89
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	34.939.930.292,00	9.611.614.178,00	25.328.316.114,00	263,52
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	34.939.930.292,00	9.611.614.178,00	25.328.316.114,00	263,52
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	526.370.542.939,09	463.374.138.502,33	62.994.890.898,76	13,59
9 . 1 . 1	Beban Pegawai – LO	150.789.720.187,00	158.984.192.472,00	(8.194.472.285,00)	(5,15)
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	36.735.279.890,34	30.385.532.330,00	6.349.747.560,34	20,90
9 . 1 . 2	Beban Jasa	70.112.876.699,00	69.517.627.832,00	595.248.867,00	0,86
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	10.446.664.574,00	9.184.426.414,00	1.262.238.160,00	13,74
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	47.569.178.193,00	48.941.094.500,00	(1.371.916.307,00)	(2,80)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	3.957.074.500,00	1.085.000.000,00	2.872.074.500,00	264,71
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	7.761.016.000,00	2.347.660.000,00	5.413.356.000,00	230,59
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	97.124.467.731,10	63.926.320.027,00	33.198.147.704,10	51,93
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	174.961.702,65	263.386.490,33	(88.424.787,68)	(33,57)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	993.389.190,00	(993.389.190,00)	(100,00)
9 . 2 . 1	Beban Transfer	101.699.303.462,00	77.745.509.247,00	23.953.794.215,00	30,81
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	106.443.936.235,53	182.140.127.014,37	(75.696.190.778,84)	(41,56)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	106.443.936.235,53	182.140.127.014,37	(75.696.190.778,84)	(41,56)

	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	878.245.910,00	536.982.500,00	341.263.410,00	63,55
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(878.245.910,00)	(536.982.500,00)	(341.263.410,00)	63,55
	SURPLUS/DEFISIT-LO	105.565.690,325,53	181.603.144.514,37	(76.037.454.188,84)	(41,87)

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, 28 Mei 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Hi. HERSON MAYULU, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	614.525.732.035,88	591.049.611.191,00	96,18	599.363.710.833,75
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	19.051.115.927,88	17.840.935.776,00	93,65	23.707.801.602,75
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.383.679.762,00	4.623.215.882,00	85,87	4.669.445.524,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.312.395.000,00	717.393.050,00	31,02	798.905.781,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	526.605.981,00	526.605.981,00	100,00	336.058.655,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	10.828.435.184,88	11.973.720.863,00	110,58	17.903.391.642,75
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	586.007.216.108,00	564.261.115.415,00	96,29	575.655.909.231,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	501.661.467.851,00	482.374.768.420,00	96,16	492.607.526.629,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	12.518.713.340,00	8.612.051.575,00	68,79	7.208.583.563,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	29.265.832.511,00	16.806.459.711,00	57,43	9.152.830.625,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	349.643.086.000,00	349.643.086.000,00	100,00	348.334.434.000,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	110.233.836.000,00	107.313.171.134,00	97,35	127.911.678.441,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA	67.560.601.000,00	67.560.601.000,00	100,00	71.628.797.000,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	67.560.601.000,00	67.560.601.000,00	100,00	71.628.797.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	15.785.147.257,00	13.496.490.495,00	85,50	11.419.585.602,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	15.785.147.257,00	13.496.490.495,00	85,50	11.419.585.602,00
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	1.000.000.000,00	829.255.500,00	82,93	0,00
4 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	1.000.000.000,00	829.255.500,00	82,93	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	9.467.400.000,00	8.947.560.000,00	94,51	0,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	9.467.400.000,00	8.947.560.000,00	94,51	0,00
5	BELANJA	572.673.743.827,35	525.633.954.529,00	91,79	480.708.258.815,68
5 . 1	BELANJA OPERASI	411.971.040.793,35	375.313.125.077,00	91,10	318.514.348.559,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	172.540.071.763,48	159.063.936.654,00	92,19	150.572.631.169,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.480.689.029,87	209.253.888.423,00	90,40	155.545.836.890,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	4.616.780.000,00	4.098.800.000,00	88,78	4.634.864.500,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	3.333.500.000,00	2.896.500.000,00	86,89	7.761.016.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	159.702.703.034,00	150.320.829.452,00	94,13	161.319.148.806,68
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1.075.000.000,00	685.587.000,00	63,78	35.000.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.337.654.263,00	19.410.691.652,00	86,90	14.122.796.311,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.670.009.843,00	49.055.781.760,00	89,73	37.772.077.543,77
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.976.921.088,00	80.526.103.410,00	99,44	108.854.374.821,91
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	643.117.840,00	642.665.630,00	99,93	534.900.130,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	874.761.450,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	874.761.450,00
6	TRANSFER	100.875.724.993,00	100.701.989.113,00	99,83	101.697.732.971,00
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	770.970.523,00	641.457.393,00	83,20	651.243.480,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	770.970.523,00	641.457.393,00	83,20	651.243.480,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	100.104.754.470,00	100.060.531.720,00	99,96	101.046.489.491,00
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	98.864.414.370,00	98.864.414.370,00	100,00	99.892.063.791,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	240.340.100,00	196.117.350,00	81,60	154.425.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.023.736.784,47)	(35.286.332.451,00)	59,78	16.957.719.047,07
7	PEMBIAYAAN				
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.023.736.784,47	58.986.047.128,47	99,94	42.066.017.737,40
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	59.023.736.784,47	58.986.047.128,47	99,94	42.066.017.737,40
	PEMBIAYAAN NETTO	59.023.736.784,47	58.986.047.128,47	99,94	42.066.017.737,40
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	23.699.714.677,47	0,00	59.023.736.784,47

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, Mei 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU, S.Pt.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

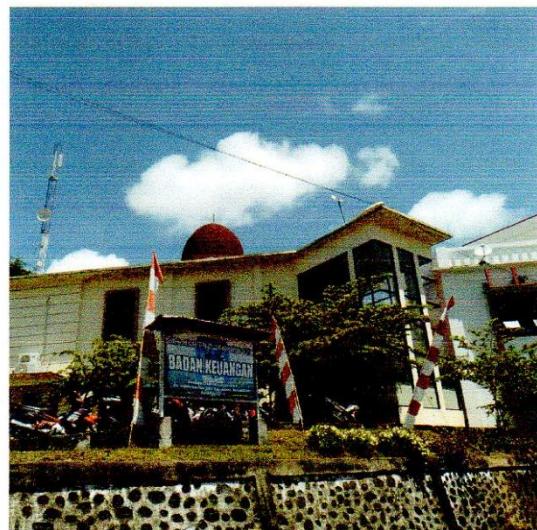
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	537.780.530.335,50	632.814.479.174,62	(95.033.948.839,12)	(15,02)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	18.743.525.076,50	24.150.561.587,62	(5.407.036.511,12)	(22,39)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.031.326.838,00	4.538.315.168,00	493.011.670,00	10,86
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	766.492.228,00	813.630.910,00	(47.138.682,00)	(5,79)
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	626.846.731,00	862.664.636,00	(235.817.905,00)	(27,34)
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	12.318.859.279,50	17.935.950.873,62	(5.617.091.594,12)	(31,32)
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	505.545.718.453,00	573.723.987.295,00	(68.178.268.842,00)	(11,88)
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	482.374.768.420,00	490.553.426.418,00	(8.178.657.998,00)	(1,67)
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	8.000.000.000,00	71.628.797.000,00	(63.628.797.000,00)	(88,83)
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	14.341.694.533,00	11.541.763.877,00	2.799.930.656,00	24,26
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	829.255.500,00	0,00	829.255.500,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	13.491.286.806,00	34.939.930.292,00	(21.448.643.486,00)	(61,39)
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	13.491.286.806,00	34.939.930.292,00	(21.448.643.486,00)	(61,39)
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	501.741.225.455,74	526.370.542.939,09	(24.629.317.483,35)	(4,68)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai – LO	158.877.948.152,00	150.789.720.187,00	8.088.227.965,00	5,36
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	33.414.243.046,41	36.735.279.890,34	(3.321.036.843,93)	(9,04)
9 . 1 . 2	Beban Jasa	90.339.104.804,00	70.112.876.699,00	20.226.228.105,00	28,85
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	9.981.046.925,00	10.446.664.574,00	(465.617.649,00)	(4,46)
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	51.753.446.397,00	47.569.178.193,00	4.184.268.204,00	8,80
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	12.419.858.700,00	3.957.074.500,00	8.462.784.200,00	213,86
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	3.604.565.100,00	7.761.016.000,00	(4.156.450.900,00)	(53,56)
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	100.024.389.762,00	97.124.467.731,10	2.899.922.030,90	2,99
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	155.021.801,33	174.961.702,65	(19.939.901,32)	(11,40)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer	41.171.600.768,00	101.699.303.462,00	(60.527.702.694,00)	(59,52)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	36.039.304.879,76	106.443.936.235,53	(70.404.631.355,77)	(66,14)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	36.039.304.879,76	106.443.936.235,53	(70.404.631.355,77)	(66,14)

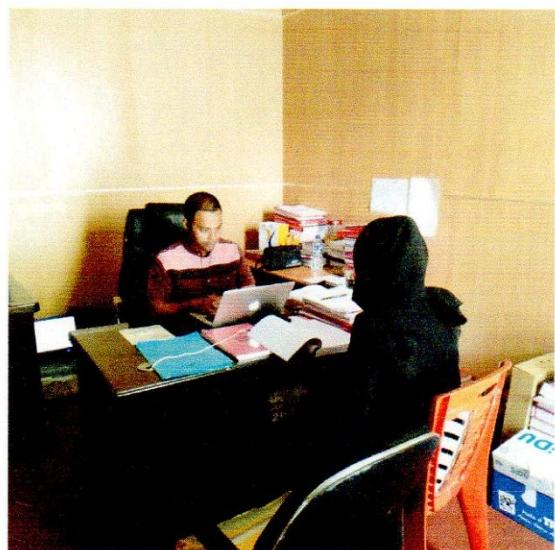
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	878.245.910,00	(878.245.910,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	(878.245.910,00)	878.245.910,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	36.039.304.879,76	105.565.690.325,53	(69.526.385.445,77)	(65,86)

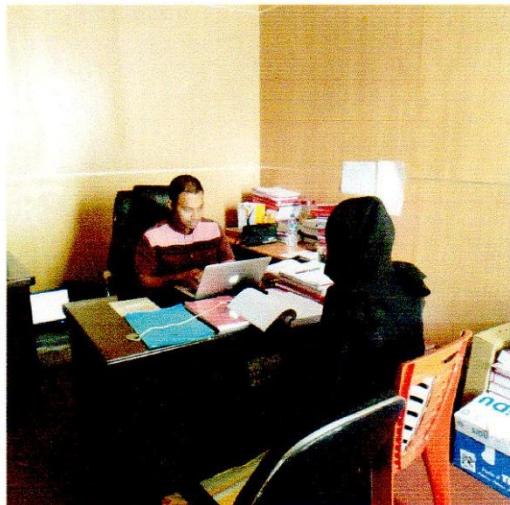
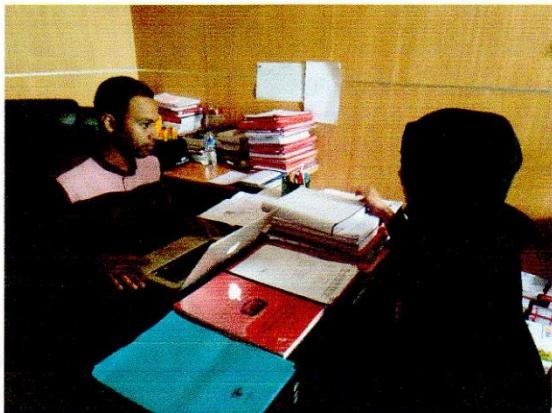
Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Bolaang Uki, Mei 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU, S.Pt.









KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 272/UNISAN-G/S-BP/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : Pratiwi Baeda
NIM : E1116078
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut diatas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Desember 2019

Tim Verifikasi,


Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1618/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. BOLSEL

di,-

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Pratiwi Baeda
NIM : E1116078
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Judul Penelitian : ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Agustus 2019
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komp. Perkantoran Panango, Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 800/09/BPKPD/I/2020

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : PRATIWI BAEDA
NIM : E1116078
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Judul Penelitian : Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Judul: "**Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

MOLIBAGU, 13 JANUARI 2020
Plt. KASUBAG UMUM, HUKUM DAN

KEPEGAWAIAN

NUR'AIN MAHMUD, A.Md
NIP. 19870601 201001 2 001

ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX **19%**
INTERNET SOURCES **8%**
PUBLICATIONS **18%**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	makalah-dudi.blogspot.com Internet Source	2%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
3	pt.scribd.com Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	dppka-kerincikab.or.id Internet Source	1%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
7	anzdoc.com Internet Source	1%
8	es.scribd.com Internet Source	1%

9	repository.uksw.edu Internet Source	1 %
10	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
11	id.scribd.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1 %
13	dilib.unpas.ac.id Internet Source	1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
15	www.pustaka.ut.ac.id Internet Source	1 %
16	ulicitra.blogspot.com Internet Source	1 %
17	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1 %
18	pt.slideshare.net Internet Source	1 %
19	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1 %

20	iwancoll98.blogspot.com Internet Source	1 %
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
22	addyst2.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
24	Yeni Riza, Norfai Norfai, Mirnawati Mirnawati. "Analisis Faktor Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Cempaka Banjarmasin", MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion, 2018 Publication	<1 %
25	docsslide.us Internet Source	<1 %
26	carapedia.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
28	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
29	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1 %

30	elibrary.ub.ac.id Internet Source	<1 %
31	Rahmatia Rahmatia. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo", Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, 2019 Publication	<1 %
32	www.e-akuntansi.com Internet Source	<1 %
33	ejournal.ekonomiuntagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
34	eprints.ung.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 25 words
Exclude bibliography Off

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	:	Pratiwi Baeda
NIM	:	E11.16.078
Tempat/Tgl Lahir	:	Gorontalo, 03 April 1998
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2016
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Tolondadu I, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan belajar di SD Negeri I Tolondadu, Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pada Tahun 2010
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri Bolaang Uki, Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada Tahun 2013
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMK Kesehatan Kharisma Totabuan Kotamobagu pada tahun 2016
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.